

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Oleh:
Alfian Haris
1125111211

Setiap daerah mempunyai pendapatan dari berbagai sektor, salah satunya adalah pendapatan pajak. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu dari pendapatan pajak daerah. Sebelum dikeluarkannya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) merupakan pajak pusat yang tergabung dalam dana perimbangan sementara BPHTB (bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) adalah pajak yang di kenakan hak atas tanah dan bangunan, dan menjadi pajak daerah Kota Yogyakarta sejak tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PBB di Yogyakarta menurun pada tahun 2015-2017, rata-rata persentase sebesar 50% dengan kriteria sangat tidak efektif, di karenakan rencana pendapatan lebih kecil dari pada realisasi pendapatan begitu juga pada BPHTB rencana pendapatan yang lebih kecil dari pada realisasi pendapatan sebesar 60% . Pendapatan PBB terhadap BKAD dikategorikan sangat kurang dengan rata-rata persentase hanya sebesar 25%.

Kata Kunci: Pendapatan

Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Land and Building Tax Revenues (PBB P2) and Fees for Acquiring Rights on Land and Buildings (BPHTB) on Regional Financial and Asset Bodies of Bantul Regency, Yogyakarta

Alfian Haris
1125111211

Each region has income from various sectors, one of which is tax revenue. Land and Building Tax is one of the local tax revenues. Prior to the issuance of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, the Land and Building Tax (PBB P2) was the central tax incorporated in the balancing fund while the BPHTB (fee for the acquisition of land and building rights) was a tax that was imposed on land rights and buildings, and has been a local tax in the city of Yogyakarta since 2012. The results of this study indicate that the effectiveness of PBB revenue in Yogyakarta decreased in 2015-2017, an average percentage of 50% with very ineffective criteria, because the revenue plan is smaller than the realization of income as well as the BPHTB revenue plan which is smaller than in revenue realization of 60%. UN revenues towards BKAD are categorized as very poor with an average percentage of only 25%.

Keywords: Income